

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### *1. Stakeholder Theory*

Pendekatan ini muncul pada pertengahan tahun 1980-an, pendekatan ini pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman. Latar belakang munculnya teori ini adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang perseptif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat itu yaitu adanya perubahan lingkungan (Miftah dan Arifin, 2013). Teori *Stakeholder* ini adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan seharusnya bertanggung jawab. Menurut Chariri dan Ghozali (2010) teori *stakeholder*, perusahaan yang beroperasi bukan hanya sekedar bertanggung jawab untuk *Shareholder* (pemilik perusahaan) namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholdernya* (masyarakat). Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari *stakeholder*, kepada pihak perusahaan tersebut. Perusahaan memiliki peluang untuk dapat diprotes dan dapat mengeliminasi legitimasi *steakholder* apabila pihak perusahaan tidak memperhatikan *steakholder*, karena perusahaan tidak bisa terlepas dari hubungan lingkungan sosial disekitarnya (Herdi dan Erinos, 2020).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kepemilikan saham publik memiliki peranan penting dalam pengungkapan aktivitas sosial (*corporate social responsibility*), disamping itu pihak perusahaan akan berusaha

memenuhi kebutuhan para *stakeholder* termasuk dalam informasi pengungkapan kebutuhan sosial yang dibutuhkan (Pramesti dan Budiasih, 2020). Teori *stakeholder* juga menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan, sehingga akan semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan, karena sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan mampu meyakinkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat (Nugroho dan Yulianto, 2015).

## **2. Agency Theory**

Latar belakang munculnya teori ini adalah berasal dari prinsip utama teori ini yang menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang kepada pihak yang menerima wewenang. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana salah satu atau lebih menyewa orang lain untuk melakukan beberapa tugas seperti jasa dan kepentingan mereka yaitu mendelegasikan beberapa wewenang pembuat keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori Keagenan didefinisikan sebagai suatu hubungan antara agen dengan pemilik usaha. Konflik yang timbul antara agen dengan pemilik usaha dapat dikurangi dengan menerapkan *Corporate governance* sebagai suatu mekanisme yang mampu mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* merupakan suatu elemen atau kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang didalamnya meliputi sebagian hubungan dan informasi

yang lengkap yang berhubungan antara manajemen perusahaan, Dewan Komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan adalah pemberi wewenang dari pihak perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan isi kontrak yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak, jika kedua belah pihak memiliki suatu kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka nantinya manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Scott, 2003). Teori keagenan memprediksi bahwa apabila perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi nantinya akan melaporkan lebih banyak informasi, dikarenakan biaya keagenan perusahaan struktur modal tersebut lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan menyatakan bahwa dewan komisaris independen diperlukan dalam memberikan pengawasan pada manajemen semakin ketat dan memperkenalkan terkait pengungkapan informasi, jika komisaris bersifat independen, sehingga keputusan perusahaan akan bersifat netral (Anggraeni, 2020).

### **3. Legitimacy Theory**

Teori Legitimasi merupakan hubungan yang saling menguntungkan, diantara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontras dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Harsanti (2011) menyatakan, bahwa teori ini menjadi salah satu sumber yang menentukan

berjalannya suatu perusahaan, organisasi berusaha memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat. Legitimasi masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu faktor strategis bagi perusahaan sebagai salah satu langkah, untuk mengembangkan perusahaan kedepannya (Hadi, 2011:87).

Trisanti (2012) menyatakan, teori legitimasi mendasarkan pada isu-isu utama dari “kontrak sosial” antara sebuah perusahaan dengan masyarakat dan memprediksi manajemen akan mengambil strategi tertentu (salah satunya strategi pelaporan) dalam tawaran untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Teori legitimasi merupakan salah satu teori mendasar dalam pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR). legitimasi merupakan sebuah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat (Yanti *et al.*, 2021). Dengan begitu sebagai sebuah sistem yang megedepankan kepentingan masyarakat, pemerintah dan kelompok masyarakat sehingga operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat (Handriyani, 2013).

#### **4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (karyawan, konsumen, komunitas, lingkungan dan pemegang saham) dalam aspek operasional perusahaan yang

diungkapkan dalam laporan tahunan (Dewi dan Sari, 2019). perusahaan dalam melakukan operasionalnya, harus menjalankan tanggung jawab atas kewajiban operasional sosialnya dan memiliki kesadaran untuk menaikan taraf kesejahteraan sosial kepada masyarakat, menurut Untung (2014:1) *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan . Perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan saja seperti halnya keuntungan atau dividen, tetapi harus berdasarkan konsekuensi sosial dilingkungan untuk saat ini dan jangka panjang (Herdi dan Erinos, 2020).

Pengungkapan CSR menjadi topik hangat dalam perbincangan di Indonesia, terkait dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan pengungkapan CSR ini dikarenakan semakin banyaknya kerusakan yang terjadi di indonesia maupun dunia, seperti pencemaran air, lingkungan, udara, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang nantinya mengganggu kelangsungan hidup manusia, dan ini semua sangat perlu untuk dilakukan pengungkapan ( Herdi dan Erinos, 2020). *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah proses mengkomunikasikan sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi pada organisasi kelompok kepentingan khusus dan masyarakat secara keseluruhan (Hackston dan Milne, 1996).

Menurut (Gray, Owen dan Maunders,1988) tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah :

- a. Untuk meningkatkan citra perusahaan.
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi adanya kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat.
- c. Untuk memberikan informasi kepada investor.

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan, ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada Bab I Pasal 1 Ayat 3, menyatakan : (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada Bab V Pasal 74, menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik adalah suatu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat atas saham perusahaan (Hamdani *et al.*, 2017). Kepemilikan saham publik umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar (lebih dari 5%), mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan publik, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai salah satu pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Basar dan Nurdian, 2020).

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik menunjukkan indikator bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dengan begitu mampu memberikan deviden yang layak dan mampu untuk terus beroperasi, sehingga sangat berpeluang untuk melakukan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan agar nantinya seluruh masyarakat mengetahui dan mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan, dengan begitu perusahaan diharapkan mampu untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak (Badjuri, 2011)

Perusahaan yang *go public* dituntut untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi yang memadai dan relevan dengan tujuan untuk

menciptakan modal yang efisien. Dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik lebih besar, akan berakibat pengawasan dari publik lebih besar (Rindawati dan Asyik, 2015). Semakin besar saham yang dimiliki publik, semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi yang seluas-luasnya dari tempat yang akan diinvestasikannya dan dapat mengawasi kinerja manajemen sehingga kepentingan perusahaan terpenuhi (Budiyono dan Maryam, 2020).

## **6. Profitabilitas**

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang mempunyai hubungan dengan penjual, total aktiva, dan ekuitas. Profitabilitas berguna dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas memperlihatkan apakah entitas tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak (Herdi dan Erinos, 2020). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka perusahaan harus melaporkan dan mengungkapkan program tanggung jawab sosialnya. Hal yang mendasari ini adalah karena pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang besar, sehingga jika perusahaan lebih profitable maka perusahaan tersebut akan terus melakukan program CSR yang lebih besar (Abbas *et al.*, 2019).

Hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* dan profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa

reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang dilakukan pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Rahayu dan Indah, 2015). Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA (*Return of Asset*) untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mendapatkan pendapatan dari pengelolaan Asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan menggunakan assetnya (Pajaria *et al*, 2016).

### **7. Leverage**

*Leverage* adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan memiliki tingkat resiko hutang tak tertagihnya pada kreditur yang nantinya akan digunakan dalam membiayai aset perusahaan (Herdi dan Erinos, 2020). Teori keagenan memprediksi Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat berpengaruh pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, dan sebaliknya perusahaan yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Asfahani (2017) menjelaskan bahwa rasio *leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal dalam suatu perusahaan sehingga dari rasio *leverage* tersebut dapat diketahui seberapa besar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya.

Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial (Santioso dan Chandra, 2012).

pentingnya tambahan informasi pada bagian pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang menunjukkan bahwa entitas memiliki sebuah peluang untuk tetap bertahan (Wartyna dan Apriwenni, 2018). Pada penelitian kali ini menggunakan pengukuran *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan sebuah perbandingan antara total ekuitas atau pemegang saham perusahaan, karena semakin besar resiko yang dihadapi nantinya investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Abbas *et al.*, 2019)

## **8. Komposisi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris bertugas dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* serta sesuai aturan yang berlaku. Pengambilan keputusan operasional dewan komisaris tidak diperbolehkan turut serta, dewan komisaris terbagi dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang disebut sebagai komisaris independen yang terafiliasi (Herdi dan Ernos, 2020).

Keberadaan komisaris independen telah diatur sejak 1 juli 2000 oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus memiliki komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai jumlah minimal komisaris independen yaitu 30% dari keseluruhan anggota komisaris.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepemilikan saham publik, profitabilitas, *leverage*, dan komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) :

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Herdi & Erinoss (2020). <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi</i> . Vol. 2. No. 1	<b>Variabel Y: CSR</b> <b>Variabel X: Profitabilitas, Leverage, Komposisi komisaris independen</b>	Profitabilitas tidak berpengaruh <i>Leverage</i> berpengaruh negatif Komposisi komisaris independen berpengaruh negatif
2.	Indraswari & Astika (2015). <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> 11.1 ISSN- 2302-8556	<b>Variabel Y: CSR</b> <b>Variabel X: Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Kepemilikan saham publik</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Ukuran perusahaan berpengaruh positif Kepemilikan public berpengaruh negatif
3	Santioso & Chandara (2012). <i>Jurnal Bisnis dan Akuntansi</i> . Vol. 14. No. 1	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X : profitabilitas, Ukuran perusahaan, Proporsi dewan direksi, Leverage, Umur perusahaan</b>	Profitabilitas berpengaruh terhadap CSR Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR Proporsi dewan direksi berpengaruh terhadap CSR <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap CSR Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR
4	Fatoni <i>et all</i> (2016). <i>Journal of</i>	<b>Variabel Y: CSR</b> <b>Variabel X :</b>	Kepemilikan publik berpengaruh terhadap

	<i>Accounting</i> . Vol. 2. No. 2	<b>kepemilikan publik, ROE, <i>Current Ratio</i>, Umur Perusahaan, Ukuran perusahaan,</b>	CSR ROE berpengaruh positif <i>Current Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap CSR Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR Ukuran perusahaan berpengaruh positif
5	Mutia <i>et all</i> (2011). <i>Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi</i> . Vol. 4. No. 2	<b>Variabel Y :CSR Variabel X : Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Ukuran dewan direksi</b>	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap CSR
6	Oktariani (2013). <i>Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi</i> . Vol. 8. No. 2	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Umur perusahaan</b>	Kepemilikan public berpengaruh negatif Ukuran perusahaan dewan komisaris berpengaruh positif Profitabilitas berpengaruh positif Umur perusahaan berpengaruh positif
7	Abbas <i>et all</i> (2019). <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> . Vol. 3. No. 2	<b>Variabel Y : CSR Variabel x : Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Leverage, Kepemilikan saham public</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Ukuran perusahaan berpengaruh positif Kepemilikan public berpengaruh negatif <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap CSR
8	Permatasari & Widyawati (2019). <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> . Vol. 8. No. 1	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan saham public</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Ukuran perusahaan berpengaruh positif Kepemilikan saham public tidak berpengaruh
9	Rindawati & Asyik (2015). <i>Jurnal Ilmu</i>	<b>Variabel Y :CSR Variabel X :</b>	Profitabilitas berpengaruh positif

	<i>dan Riset Akuntansi</i> . Vol. 4. No. 6	<b>Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Leverage, Kepemilikan publik</b>	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR <i>Leverage</i> berpengaruh negatif Kepemilikan public berpengaruh negatif
10	Pajaria <i>et all</i> (2016). <i>Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi</i> . Vol. 10. No. 2	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Diversitas Dewan Direksi, Ukuran perusahaan, Profitabilitas</b>	Diversitas berpengaruh terhadap CSR Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap CSR Profitabilitas tidak berpengaruh
11	Hamdani, Yuliandri dan Budiono (2017), <i>Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer</i> . Vol.9 ,No.1	<b>Variabel Y :CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Kepemilikan saham publik , Return On Asset</b>	Kepemilikan saham public berpengaruh positif <i>Return On Asset</i> berpengaruh positif
12	Basar, N. F., & Nurdiana. (2020). <i>Jurnal Economix</i> , 8(1), 71-82	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Kepemilikan Publik</b>	Kepemilikan Publik berpengaruh positif
13	Rahayu, P., & Anisyukurlillah, I. (2015). <i>Accounting Analysis Journal</i> , 4(3), 1–9.	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Media</b>	Kepemilikan Publik berpengaruh positif Profitabilitas tidak berpengaruh Media tidak berpengaruh
14	Pramesti, A. A. W. L., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). <i>E-Jurnal Akuntansi</i> , 30(4), 1006–1028.	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Ukuran Perusahaan berpengaruh positif Kepemilikan Publik berpengaruh positif
15	Rofiqkoh, E., & Priyadi, M. P. (2016). <i>Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi</i> ISSN: 2460-0585, 5(10), 1–18.	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X :</b> <b>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan</b>	Profitabilitas berpengaruh positif, <i>leverage</i> berpengaruh positif, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif
16	Wahyuningsih, A., & Mahdar, N. M.	<b>Variabel Y : CSR</b> <b>Variabel X : Size,</b>	Size berpengaruh positif <i>Leverage</i> berpengaruh

	(2018). Kalbisocio, 5(1), 28–36.	<b>Leverage, Profitabilitas</b>	positif Profitabilitas berpengaruh positif
17	Yanti, N. L. E. K., Made, E. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2021). Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1), 43.	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, Profitabilitas</b>	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh Leverage berpengaruh positif Prifitabilitas berpengaruh positif
18	Nur, M dan Priantinah, D. (2012). Jurnal Nominal. 1(1).	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, Dewan Komisaris, Leverage, Pengungkapan Media</b>	Profitabilitas tidak berpengaruh Ukuran Perusahaan berpengaruh positif Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh Dewan Komisaris Berpengaruh Leverage Berpengaruh Pengungkapan Media tidak berpengaruh
19	Sari, Lian Permata. (2014). Jurnal Akuntansi.	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Asing</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh Kepemilikan Saham Asing tidak berpengaruh
20	Noviani, K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Jurnal Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).	<b>Variabel Y : CSR Variabel X : Profitabilitas, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional</b>	Profitabilitas berpengaruh positif Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut dari kualitas hidup yang kurang baik (Darwin, 2006). Hasil dari penelitian Herdi dan Erinosa (2020) menunjukkan hasil Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap CSR, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap CSR, dan Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap CSR.

Secara teori Keagenan, adanya kepemilikan saham publik memberi tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan praktik pengungkapan CSR lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan dengan semakin tingginya kepemilikan saham publik, maka sorotan dari publik akan tinggi terhadap perusahaan, sehingga perusahaan perlu untuk melakukan upaya pemberian informasi lebih banyak kepada publik (Hamdani *et al.*, 2017)

Demikian pula dengan profitabilitas dan dewan komisaris independen. Perusahaan yang memiliki keuangan yang kuat akan lebih mendapatkan tekanan dari pihak eksternal lebih besar daripada perusahaan yang memiliki keuangan yang lemah, sehingga perusahaan perlu memberikan informasi lebih banyak kepada stakeholder sebagai sebuah pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya alam hasil kapitalisasi modal yang besar (Herdi dan Erinosa, 2020).

Sedang pada variabel dewan komisaris independen, dengan keberadaan dewan komisaris independen ini, maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh tugas dewan komisaris independen sebagai pihak yang mempertimbangkan kepentingan pemilik dan *stakeholder*, sehingga perusahaan perlu memberi informasi lebih banyak sebagai jawaban atas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan (Herdi dan Erinos, 2020).

### **1. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh public atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak perusahaan (Agustiani dan Brahmayanti, 2019). Semakin besar kepemilikan saham publik, maka publik akan semakin ingin mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terkategori dalam tipe *high profile industries* (Hamdani *et al.*, 2017). Berdasarkan teori stakeholder, kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*, karena menurut teori ini kepemilikan saham publik memiliki peran penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), (Pramesti dan Budiasih, 2020).

Penelitian yang mendukung hal tersebut antara lain dilakukan oleh Hamdani (2017), Rahayu dan Indah (2015), Permatasari dan Widyawati (2019), Pramesti dan Budiasih (2020), dan Hitipeuw dan Kuntari (2020),

yang menunjukkan hasil kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

## **2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam menghasilkan profit melalui sumber daya yang dimiliki yaitu kegiatan perusahaan, penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal (Wilangga *et al.*, 2020). Perusahaan yang memiliki keuangan yang kuat akan lebih mendapatkan tekanan dari pihak eksternal lebih besar daripada perusahaan yang memiliki keuangan yang lemah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki keuangan yang kuat, memiliki potensi mengkapitalisasi modal lebih besar, sehingga lebih memiliki potensi mengekstraksi alam lebih tinggi (Rindawati dan Asyik, 2015). Sesuai dengan teori stakeholder semakin tinggi profit perusahaan dengan begitu akan semakin banyak item pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate social responsibility*) (Nugroho dan Yulianto, 2015). Hal inilah yang menyebabkan perusahaan yang berprofitabilitas tinggi akan melakukan pengungkapan CSR lebih banyak, demi mengurangi tekanan dari pihak luar (Herdi dan Erinos, 2020).

Penelitian terdahulu dari Indraswari dan Astika (2015), Oktariani (2013), Abbas (2019), Permatasari dan Widyawati (2019), Rindawati dan

Asyik (2015) serta Hamdani *et al* (2017), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H<sub>2</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### **3. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Leverage* adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Putri, 2017). Secara sudut pandang teori Agensi, pada perusahaan dengan *leverage* yang tinggi, akan memiliki biaya keagenan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya tekanan dari pihak eksternal untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perusahaannya (Purba dan Yadnya, 2015). Konsekuensinya, sebagai media untuk menekan biaya agensi yang tinggi tersebut, maka perusahaan yang berhutang tinggi akan lebih sedikit melakukan pengungkapan CSR dibanding perusahaan yang berhutang sedikit, yang mana lebih mampu secara keuangan dalam mengelola kinerja non keuangan (Herdi dan Erinos, 2020).

Penelitian dari Purba dan Yadnya (2015), Rofiqoh dan Priyadi (2016), Yanti dan Budiasih (2016), Wahyuningsih dan Mahdar (2019), dan Yanti *et al* (2021) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

#### **4. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dewan Komisaris Independen memiliki kedudukan sebagai pengendali internal dalam perusahaan, yang salah satunya adalah mengarahkan dewan direksi untuk berkomitmen melaksanakan *good corporate governance* (Anggraeni, 2020). Dewan Komisaris Independen memiliki independensi dalam tugasnya, tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, memperhitungkan kepentingan pemilik sekaligus kepentingan *stakeholder* lainnya (Herdi dan Erinos, 2020). Sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen diperlukan dalam memberikan pengawasan pada manajemen dan jika komisaris bersifat independen, sehingga keputusan perusahaan akan bersifat netral (Anggraeni, 2020)

Penelitian terdahulu dari Nur dan Priantinah (2012), Sari dan Lian Permana (2014), Oktariani (2013), dan Herdi dan Erinos (2020) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H<sub>4</sub> : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka teori dan pengembangan hipotesis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**

